

DE-ARABISASI DAN TRANSFORMASI PERADABAN: KAJIAN POLITIK, ADMINISTRASI, EKONOMI, DAN HUKUM PADA DINASTI ABBASIYAH PERIODE PERTAMA

Khalil Rahman^a, Fadil SJ^b,
khalilrahmaan.kr@gmail.com, fadilsj@syariah.uin-malang.ac.id

^{a b} Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia.

ARTICLE INFO

Received: 30th June 2025

Revised: 18th December 2025

Accepted: 19th December 2025

Published: 20th December 2025

Permalink/DOI

<https://doi.org/10.51190/jazirah.v6i2.262>



This work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Print ISSN: 2716-4454,
Online ISSN: 2774-3144

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji proses de-Arabisasi dan dampaknya terhadap transformasi peradaban pada periode pertama Dinasti Abbasiyah (750-847 M), dengan fokus pada tiga bidang utama, yaitu politik dan administrasi pemerintahan, ekonomi, serta sistem hukum. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana pengurangan dominasi eksklusif etnis Arab pasca runtuhnya Dinasti Umayyah mengubah konfigurasi kekuasaan dan kelembagaan negara, serta bagaimana integrasi etnis non-Arab khususnya Persia pada fase awal dan Turki pada fase akhir membentuk model pemerintahan Abbasiyah yang multietnis. Penelitian ini bertujuan untuk memperjelas mekanisme de-Arabisasi sebagai strategi politik-administratif yang terencana, mengungkap kontribusi konkret elite non-Arab dalam pengelolaan negara, serta memetakan capaian institusional kekhalifahan dari masa al-Saffah hingga awal pemerintahan al-Mutawakkil. Metode yang digunakan adalah metode sejarah dengan empat tahapan, yaitu heuristik, kritik sumber (eksternal dan internal), interpretasi, dan historiografi. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap sumber primer, terutama karya Yusuf al-'Isy dan Muhammad al-Khudhari dalam terjemahan Indonesia yang diverifikasi dengan teks Arab aslinya, serta didukung oleh literatur sekunder berupa artikel jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa de-Arabisasi pada periode pertama Abbasiyah bukan sekadar pergantian elite etnis, melainkan strategi sistematis untuk membangun pemerintahan multietnis berbasis birokrasi profesional dan jaringan militer non-Arab. Integrasi teknokrat Persia melalui lembaga wizarat dan diwan meningkatkan efektivitas administrasi dan memungkinkan pengelolaan wilayah kekuasaan yang luas dan beragam. Namun, pada fase akhir periode pertama, ketergantungan pada militer Turki menggeser keseimbangan kekuasaan dari birokrasi sipil menuju dominasi militer, yang berdampak pada melemahnya otoritas khalifah dan meningkatnya intervensi militer dalam politik khalifah. Dalam bidang ekonomi dan hukum, konsolidasi fiskal, integrasi perdagangan internasional, serta institusionalisasi Qadhi al-Qudhah, al-Hisbah, dan Wilayah al-Mazhalim menandai kematangan tata kelola negara, sekaligus membentuk dinamika kekuasaan Abbasiyah pada periode-periode berikutnya.

KATA KUNCI Dinasti Abbasiyah, de-Arabisasi, Transformasi Abbasiyah Periode Pertama

ABSTRACT

This article examines the process of de-Arabization and its impact on civilizational transformation during the first period of the Abbasid Dynasty (750-847 CE), focusing on three main domains: politics and administrative governance, economy, and the legal system. The central issue addressed is how the decline of exclusive Arab dominance following the collapse of the Umayyad Dynasty reshaped the configuration of power and state institutions, as well as how the integration of non-Arab ethnic groups particularly Persians in the early phase and Turks in the later phase formed a multiethnic model of Abbasid governance. This study aims to clarify the mechanisms of de-Arabization as a planned political-administrative strategy, to reveal the concrete contributions of non-Arab elites in state management, and to map the institutional achievements of the caliphate from the reign of al-Saffah to the early period of al-Mutawakkil. The research employs the historical method through four stages: heuristics, source criticism (external and internal), interpretation, and historiography. Data are obtained through library research using primary sources, mainly the Indonesian translations of works by Yusuf al-'Isy and Muhammad al-Khudhari, which are verified against their original Arabic texts, and supported by relevant peer-reviewed journal articles. The findings indicate that de-Arabization during the first Abbasid period was not merely an ethnic replacement of elites, but a systematic strategy to construct a multiethnic government based on professional bureaucracy and non-Arab military networks. The integration of Persian technocrats through the institutions of wizarat and diwan significantly enhanced administrative efficiency and enabled effective governance over a vast and diverse empire. However, in the later phase of this period, growing dependence on Turkish military forces shifted the balance of power from civilian bureaucracy toward military dominance, weakening caliphal authority and increasing military intervention in court politics. In the economic and legal spheres, fiscal consolidation, integration of international trade, and the institutionalization of Qadhi al-Qudhah, al-Hisbah, and Wilayah al-Mazhalim reflected the maturity of Abbasid state governance, while simultaneously shaping the political dynamics of subsequent Abbasid periods.

KEYWORDS

Abbasid Dynasty, de-Arabization, First Period Abbasid Transformation.

PENDAHULUAN

Periode pertama Dinasti Abbasiyah (750-847 M) sering diposisikan sebagai fase awal Zaman Keemasan Islam, ketika dunia Islam mengalami kemajuan signifikan dalam bidang politik, administrasi pemerintahan, ekonomi, dan sistem hukum.¹ kekhilafahan Abbasiyah tidak hanya berhasil menstabilkan kekuasaan pasca runtuhnya Dinasti Umayyah, tetapi juga membangun tatanan pemerintahan yang relatif lebih inklusif dan adaptif terhadap keragaman etnis serta sosial.² Transformasi tersebut menandai pergeseran mendasar dari model pemerintahan Umayyah yang cenderung berorientasi pada dominasi etnis Arab menuju struktur kekuasaan yang lebih multietnis dan birokratis.

Salah satu proses kunci yang mewarnai transformasi tersebut adalah “de-Arabisasi”. Dalam artikel ini, de-Arabisasi tidak dipahami sebagai penghapusan identitas Arab, melainkan sebagai pengurangan dominasi eksklusif etnis Arab dalam struktur kekuasaan dan institusi negara.³ Proses ini berlangsung melalui dua jalur yang saling berkaitan.⁴ Pertama, melalui kebijakan sistematis para khalifah Abbasiyah periode awal terutama masa khalifah al-Saffah dan al-Mansur yang secara sadar membuka akses jabatan strategis bagi kelompok non-Arab, khususnya Persia, dalam birokrasi, keuangan, dan administrasi negara. Kedua, melalui perubahan yang lebih organik dalam struktur sosial-politik, di mana kelompok non-Arab yang sebelumnya termarginalkan (mawali) secara bertahap memperoleh peran dominan seiring dengan meningkatnya kebutuhan negara akan aparatur profesional dan loyal, bukan semata berbasis kesukuan.

Dalam konteks ini, peran kelompok etnis non-Arab menjadi faktor penting dalam pembentukan pemerintahan Abbasiyah. Pada tahap awal periode pertama, bangsa Persia memainkan peran penting, terutama melalui kontribusi mereka dalam pengembangan sistem administrasi dan birokrasi negara.⁵ Tradisi tata kelola Persia yang telah mapan sejak masa pra-Islam memberikan kerangka kelembagaan bagi Abbasiyah untuk membangun pemerintahan yang lebih terstruktur, efisien, dan terpusat. Pada tahap akhir periode pertama, khususnya sejak masa al-

¹ Fadil SJ, *Pasang Surut Peradaban Islam Dalam Lintasan Sejarah* (Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008), 149.

² Umi Muti'ah Putri, Haidar Putra Daulay, and Solihah Titin Sumanti, “Nilai Pendidikan Interaksi Multikulturalisme Dalam Perwujudan Humanisme Di Era Khalifah Bani Abbasiyah,” *Education Achievement: Journal of Science and Research*, January 19, 2025, 263-76, <https://doi.org/10.51178/jsr.v6i1.2330>.

³ Ahmad Syafi'i Mufadzilah Riyadi and Muhammad Habib Adi Putra, “Dearabization of Islamic Government during the Abbasid Dynasty,” *Journal of Islamic History and Manuscript* 1, no. 1 (September 2022): 53-68, <https://doi.org/10.24090/jihm.v1i1.6591>.

⁴ Yazidul Bustomi and Rudy Catur Rohman Kusmayadi, “MULTIKULTURALISME PADA MASA UMMAYAH DALAM SEJARAH PERADABAN ISLAM,” *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (May 2024): 66-79, <https://doi.org/10.58401/takwiluna.v5i1.1334>.

⁵ Yusuf Al-Isy, *Dinasti Abbasiyah*, 1st ed. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 39.

Mu'tasim, pengaruh bangsa Turki mulai menguat, terutama dalam bidang militer.⁶ Rekrutmen tentara Turki tidak hanya berdampak pada stabilitas keamanan negara, tetapi juga mengubah konfigurasi kekuasaan politik Abbasiyah secara signifikan. Dengan demikian, de-Arabisasi tidak bersifat homogen, melainkan mengalami pergeseran aktor dan fungsi sesuai kebutuhan politik dan administratif negara.

Fenomena de-Arabisasi ini berkorelasi erat dengan apa yang dalam artikel ini disebut sebagai “modernisasi” pemerintahan Abbasiyah.⁷ Modernisasi dimaknai sebagai proses rasionalisasi dan institusionalisasi kekuasaan.⁸ Dalam bidang administrasi, modernisasi tercermin dalam pembentukan lembaga-lembaga negara yang lebih sistematis, seperti wizarat dan jaringan diwan, yang memungkinkan pengelolaan pajak, sumber daya, dan wilayah secara lebih efektif.⁹ Pada sektor ekonomi, jaringan perdagangan lintas wilayah mengalami perkembangan pesat karena sungai Tigris dan Eufrat menjadi pelabuhan transmisi bagi kapal-kapal dagang dari berbagai penjuru dunia.¹⁰ Sementara itu, dalam bidang hukum, terjadi penguatan sistem melalui penyusunan atau kodifikasi hukum Islam, berkembangnya mazhab-mazhab fikih, serta meningkatnya peran ulama dalam proses hukum.¹¹ Pertemuan antara nilai-nilai Islam dan sistem kelembagaan ini menciptakan dasar hukum yang kuat untuk menjaga stabilitas sosial dan politik.

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam kajian ini antara lain artikel “Masa Keemasan Dinasti Abbasiyah (Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Politik, Ekonomi dan Sosial Budaya)” karya Dewita Sekar Wangi dan M. Mujab.¹² Tulisan tersebut memiliki irisan tema dengan penelitian ini karena sama-sama membahas politik dan ekonomi Abbasiyah. Namun, fokus kedua kajian tersebut bersifat umum dan lebih menyoroti perkembangan ilmu-ilmu pengetahuan secara rinci dan tidak mengulas secara khusus proses de-Arabisasi

⁶ Al-Isy, *Dinasti Abbasiyah*, 102.

⁷ Nabilah Widya and Meyniar Albina, “Multikulturalisme Pada Masa Dinasti Abbasiyah,” *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 2 (December 2024): 296-99.

⁸ Mahbubah Hasanah, Ainun Thayyibah, and Muhammad Fadhil Khairi, “HAKIKAT MODERN, MODERNITAS DAN MODERNISASI SERTA SEJARAH MODERNISASI DI DUNIA BARAT,” *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 2 (April 2023): 309-18, <https://doi.org/10.55606/religion.v1i2.76>.

⁹ Sabda Maulana and Tenny Sujatnika, “Islam Dan Peradaban Persia: Integrasi Budaya Dan Keilmuan Pada Masa Dinasti Abbasiyah,” *Jurnal Teologi Islam* 1, no. 2 (July 2025): 188-97, <https://doi.org/10.63822/shzt2x35>.

¹⁰ Naila Farah, “PERKEMBANGAN EKONOMI DAN ADMINISTRASI PADA MASA BANI UMAYYAH DAN BANI ABBASIYAH,” *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari’ah* 6, no. 2 (February 2016), <https://doi.org/10.24235/amwal.v6i2.227>.

¹¹ Rheny Windi Nabila et al., “Dinamika Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Dinasti Abbasiyah,” *Tabayyun: Journal of Islamic Studies* 2, no. 01 (June 2024), <https://journal.tabayyanu.com/index.php/tabayyun/article/view/56>.

¹² Dewita Sekar Wangi and M. Mujab Mujab, “Masa Keemasan Dinasti Abbasiyah (Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Politik, Ekonomi Dan Sosial Budaya),” *Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam* 8, no. 1 (June 2023), <https://doi.org/10.29300/ttjksi.v8i1.4149>.

maupun perubahan komposisi etnis dalam struktur kekuasaan. Di titik ini, penelitian ini menawarkan pendalaman yang lebih terarah terhadap aspek perubahan kelembagaan yang dipicu oleh meningkatnya partisipasi etnis non-Arab. Rujukan kedua adalah artikel “Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Sistem Pemerintah Dan Ilmu Tasawuf Pada Dinasti Abbasiyah” karya Mohammad Anggi Hidayat.¹³ Artikel tersebut juga memiliki kedekatan tema dengan penelitian ini karena sama-sama membahas sistem pemerintahan Abbasiyah, tetapi penekanannya lebih diarahkan pada aspek-aspek acuan dalam pemerintahan. Penelitian ini menawarkan pembacaan yang lebih interkonektif antara dimensi politik, ekonomi, hukum, dan administrasi, dengan menjadikan de-Arabisasi sebagai variabel kunci analisis. Adapun artikel ketiga, “Multikulturalisme Pada Masa Dinasti Abbasiyah” karya Nabila Widya dan Meyniar Albina.¹⁴ Kajian tersebut menceritakan bagaimana kehidupan sosial dan keragaman pada masa Dinasti Abbasiyah secara umum, namun tidak secara spesifik memfokuskan kajian pada periode pertama.

Dengan demikian, artikel ini menempatkan de-Arabisasi sebagai poros utama analisis untuk memahami proses modernisasi pemerintahan Abbasiyah periode pertama. Dengan mengintegrasikan dimensi politik, administrasi, ekonomi, dan hukum dalam satu kerangka konseptual, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan historis yang lebih komprehensif dibandingkan kajian-kajian sebelumnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi empat tahapan pokok, yaitu heuristik (pengumpulan data), kritik (verifikasi sumber), interpretasi (analisis makna historis), dan historiografi (penyusunan naratif koheren).¹⁵ Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti menelusuri proses historis secara kronologis sekaligus menganalisis makna dan implikasi transformasi kelembagaan yang terjadi pada periode pertama Dinasti Abbasiyah.

Pada tahap heuristik (pengumpulan sumber), peneliti terlebih dahulu menelusuri katalog perpustakaan Universitas Brawijaya dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk memperoleh karya-karya yang secara langsung membahas Dinasti Abbasiyah. Dari hasil penelusuran tersebut diperoleh dua buku terjemahan berbahasa Indonesia sebagai sumber primer utama, yaitu: Dinasti

¹³ Mohammad Anggi Hidayat, “PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN, SISTEM PEMERINTAH DAN ILMU TASAWUF PADA DINASTI ABBASIYAH,” *Jurnal Keislaman* 5, no. 2 (September 2022): 230-37, <https://doi.org/10.54298/jk.v5i2.3488>.

¹⁴ Widya and Albina, “Multikulturalisme Pada Masa Dinasti Abbasiyah.”

¹⁵ Nina Herlina, *Metode Sejarah*, 2nd ed. (Bandung: Satya Historika, 2020), 30, https://digilib-pps.insuriponorogo.ac.id/file_buku/b650b4f43aa66c24eb2883d7cae9a8c5.pdf.

Abbasiyah karya Dr. Yusuf Al-Isy, terbit pada tahun 2007, cetakan pertama, dan diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar (terjemahan dari Tarikh ‘Ashr al-Khilafah al-‘Abbasiyyah), yang diperoleh dari koleksi perpustakaan UIN Malang.¹⁶ Selanjutnya, buku kedua yaitu “Bangkit dan Runtuhnya Daulah Abbasiyah” karya Syaikh Muhammad Al-Khudhari, terbit pada tahun 2016, cetakan pertama, diterbitkan oleh Pustaka Al-Kautsar (terjemahan dari ad-Daulah al-‘Abbasiyyah), yang diperoleh dari koleksi perpustakaan Universitas Brawijaya Malang.¹⁷

Pemilihan terjemahan Indonesia dilakukan dengan pertimbangan aksesibilitas akademik dan keterbatasan edisi cetak kitab Arab di perpustakaan kampus. Untuk menghindari risiko distorsi makna akibat penerjemahan, peneliti memastikan kembali identitas teks Arab aslinya melalui pembacaan terhadap buku aslinya yang dapat diakses di Internet. (judul Arab, nama pengarang, dan data bibliografis penerbit asal), sehingga jelas bahwa yang digunakan adalah terjemahan dari kitab klasik berbahasa Arab, bukan karya sekunder yang berdiri sendiri. Selain sumber primer, peneliti mengumpulkan sumber sekunder berupa artikel jurnal nasional dan internasional yang relevan. Pemilihan artikel jurnal dilakukan berdasarkan kriteria berikut: (1) membahas Dinasti Abbasiyah atau transformasi kelembagaan Islam awal, (2) diterbitkan dalam jurnal ilmiah nasional atau jurnal internasional, (3) memiliki keterkaitan langsung dengan tema de-Arabisasi, birokrasi multietnis, ekonomi politik, atau sistem hukum Islam, dan (4) digunakan untuk memperkuat analisis, bukan menggantikan sumber primer. Artikel-artikel tersebut diakses melalui Google Scholar dan portal jurnal ilmiah lainnya.

Tahap kritik sumber dilakukan dalam dua tingkatan, yaitu kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern digunakan untuk menilai otentisitas dan kredibilitas sumber, misalnya dengan memeriksa reputasi penerbit yang mana Pustaka Al-Kautsar sebagai penerbit buku-buku keislaman yang cukup terkenal, tahun terbit, keterangan penerjemah, serta informasi mengenai teks Arab asli yang menjadi rujukan. Misalnya, karya Yusuf al-‘Isy dikritisi secara ekstern dengan memastikan bahwa buku tersebut merupakan terjemahan dari karya sejarah Abbasiyah yang ditulis oleh akademisi Suriah yang dikenal luas dalam kajian sejarah Islam, bukan karya populer tanpa dasar filologis. Kritik intern dilakukan dengan menilai isi sumber secara substantif. Sebagai contoh, ketika al-Khudhari menggambarkan peran khalifah Abbasiyah sebagai pusat otoritas politik yang kuat, narasi tersebut dibandingkan dengan temuan artikel jurnal kontemporer yang menunjukkan adanya pergeseran kekuasaan ke tangan elite birokrasi dan militer non-Arab pada fase tertentu. Perbandingan ini memungkinkan peneliti

¹⁶ Al-Isy, *Dinasti Abbasiyah*.

¹⁷ Syaikh Muhammad Al-Khudhari, *Bangkit Dan Runtuhnya Daulah Abbasiyah*, 1st ed. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016).

membedakan antara narasi normatif dan dinamika struktural yang lebih kompleks, sehingga menghindari penerimaan teks secara deskriptif semata.

Tahap interpretasi dilakukan dengan cara menghubungkan data-data historis yang telah lolos kritik dengan fokus penelitian, yaitu de-Arabisasi dan transformasi peradaban pada periode pertama Abbasiyah. Data mengenai keterlibatan etnis non-Arab, kebijakan pemindahan ibu kota ke Baghdad, pembentukan lembaga wazir dan diwan, penguatan lembaga peradilan, serta perkembangan ekonomi dan perdagangan dianalisis dalam kerangka konsep seperti pluralisme etnis dalam kekuasaan, transformasi kelembagaan, dan pergeseran struktur otoritas politik. Pada tahap ini, deskripsi sejarah dalam sumber primer dipadukan secara analitis dengan temuan studi-studi kontemporer untuk menghasilkan pemaknaan yang lebih sistematis.

Tahap terakhir adalah historiografi, yakni penyusunan hasil penelitian dalam bentuk narasi ilmiah yang runtut. Fakta-fakta historis yang telah dipilih disusun ke dalam pembahasan yang meliputi konsep awal dan proses de-Arabisasi dalam Dinasti Abbasiyah periode pertama, perkembangan politik dan administrasi pemerintahan, ekonomi, serta sistem hukum Abbasiyah periode pertama. Penulisan dilakukan dengan gaya deskriptif-analitis, sehingga pembaca tidak hanya mendapatkan urutan peristiwa secara kronologis, tetapi juga pemahaman tentang strategi kekuasaan yang ditempuh, puncak-puncak kemajuan yang dicapai, serta signifikansi transformasi tersebut bagi pembentukan peradaban Islam pada masa Abbasiyah periode pertama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Awal Dan Proses De-Arabisasi Dalam Dinasti Abbasiyah Periode Pertama

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, awalan de- berarti “menghilangkan” atau “mengurangi” sebagaimana pada kata dehidrasi (kehilangan cairan tubuh).¹⁸ Dalam konteks artikel ini, istilah de-Arabisasi dipahami sebagai suatu proses yang bertujuan mengurangi dominasi unsur Arab dalam sistem sosial, budaya, maupun struktur kekuasaan tertentu, tanpa berarti menghapuskan sepenuhnya identitas Arab.¹⁹ Dengan demikian, de-Arabisasi yang dibahas dalam artikel ini lebih merujuk pada transformasi politik dan administratif, bukan penolakan terhadap bahasa atau budaya Arab itu sendiri.

Sementara itu, istilah Arabisasi dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan ta'rib yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja 'arraba, yang

¹⁸ “Arti Kata De--2 - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed December 6, 2025, <https://kbbi.web.id/de--2>; “Hasil Pencarian - KBBI VI Daring,” accessed December 6, 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/de>.

¹⁹ Riyadi and Putra, “Dearabization of Islamic Government during the Abbasid Dynasty.”

berarti memindahkan sesuatu ke dalam bentuk Arab. Seperti dijelaskan oleh Ghanim dan dikutip oleh Al-Shbiel, ta'rib merupakan proses pengalihan istilah asing ke dalam bahasa Arab dengan tetap memperhatikan kaidah linguistik untuk menjamin kejelasan makna dan kefasihan lafal.²⁰ Maka, jika kedua istilah ini digabung, de-Arabisasi secara terminologis dapat dipahami sebagai upaya untuk mengurangi dominasi unsur Arab baik dalam bahasa, budaya, maupun sistem kekuasaan. Dalam kajian ini, istilah tersebut digunakan untuk menggambarkan transformasi sosial-politik yang terjadi pada masa Dinasti Abbasiyah periode pertama (750-847 M) sebagai reaksi terhadap pola Arabisasi yang dominan pada masa dinasti sebelumnya.

Akar munculnya fenomena de-Arabisasi ini dapat ditelusuri sejak akhir masa Dinasti Umayyah. Saat itu, kelompok mawali (Muslim non-Arab) mendapatkan perlakuan diskriminasi dalam tetapan tarif pajak, status sosial, dan akses jabatan strategis pada pemerintahan meskipun telah memeluk Islam.²¹ Ketidakadilan ini memicu ketidakpuasan di kalangan mawali, terutama di wilayah timur seperti Khurasan, yang kemudian menjadi salah satu basis Revolusi Abbasiyah.²² Ketegangan ini tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga politis, karena elite Arab Umayyah mempertahankan monopoli kekuasaan.

Kebijakan politik Umayyah yang sering mengeksplorasi suku non-Arab justru menjadi kelemahan struktural. Kelemahan ini dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok Abbasiyah untuk merebut kekuasaan. Dukungan dari kaum Syiah melalui Bani Hasyimiyah serta mawali Persia menjadi faktor penting yang memungkinkan Dinasti Abbasiyah mencapai tujuannya.²³ Dukungan ini bukan sekadar solidaritas ideologis, tetapi juga aliansi strategis untuk meruntuhkan dominasi Arab eksklusif

Secara singkat, keberhasilan Revolusi Abbasiyah tidak dapat dilepaskan dari peran mawali Persia dan kaum Syiah. Prosesnya melalui tiga fase penting: Fase pertama dimulai oleh Ali bin Abdullah Al-Abbas, yang menerima wasiat kepemimpinan dari Abu Hasyim bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, pemimpin Syiah Kisaniyah saat itu menjelang ajalnya.²⁴ Maka secara otomatis, ia pun mendapat dukungan dari kelompok Syiah Kisaniyah, meskipun kelompok Syiah

²⁰ Abeer Obeid Al-Shbiel, "Arabization and Its Effect on the Arabic Language," *Journal of Language Teaching and Research* 8, no. 3 (2017): 469-75, <https://doi.org/10.17507/jltr.0803.04>.

²¹ Tiara Istighfari and Tenny Sudjatnika, "Gerakan Arabisasi Pada Masa Dinasti Umayyah: Dampak Terhadap Masyarakat Islam Dan Non-Islam," *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (June 2025): 1694-703, <https://doi.org/10.63822/kkzpx337>.

²² Al-Isy, *Dinasti Abbasiyah*, 13.

²³ Roberto Marín-Guzmán, "Arab Tribes, the Umayyad Dynasty, and the 'Abbasid Revolution,'" *American Journal of Islam and Society* 21, no. 4 (October 2004): 57-96, <https://doi.org/10.35632/ajis.v21i4.513>.

²⁴ Al-Khudhari, *Bangkit Dan Runtuhnya Daulah Abbasiyah*, 15.

lain seperti Zaidiyah dan Imamiyah tetap memiliki figur pemimpin masing-masing. Pasca wafatnya Ali bin Abdullah, fase kedua dimulai di bawah kepemimpinan putranya, Muhammad bin Ali. Pada tahap ini, ia mulai menyebarkan propaganda Abbasiyah secara lebih sistematis ke wilayah Khurasan yang mana daerah dengan mayoritas penduduknya merupakan mawali Persia dengan mengutus sekitar dua belas orang sebagai agen dakwah politik.²⁵ Setelah Muhammad bin Ali wafat, putranya, Ibrahim bin Muhammad, melanjutkan perjuangan. Pada fase ini, ia bertemu dengan Abu Muslim Al-Kurasani, seorang pemuda Persia yang cerdas dan bekas hamba sahaya. Abu Muslim dijadikan figur penting dalam penyebaran propaganda di Khurasan.²⁶ Ibrahim sangat membutuhkan dukungan penduduk Khurasan, dan melalui Abu Muslim, ia akhirnya berhasil menguasai wilayah tersebut dengan mengalahkan gubernur Umayyah yang berkuasa disana.²⁷ Fase ketiga merupakan fase penentu menjelang keberhasilan revolusi Abbasiyah. Pada tahap ini, Ibrahim bin Muhammad ditangkap oleh Marwan bin Muhammad, khalifah terakhir Dinasti Umayyah. Sebelum ditangkap, Ibrahim memerintahkan saudaranya, Abul Abbas, untuk hijrah ke Kufah dan melanjutkan perjuangan Bani Abbasiyah.²⁸ Dari Kufah inilah gerakan Abbasiyah mengorganisir kekuatan militer hingga berhasil mengalahkan pasukan Marwan bin Muhammad dalam pertempuran di tepi Sungai Az-Zab.²⁹ Marwan sempat melarikan diri, namun akhirnya terbunuh di daerah Bushair dekat Mesir, yang sekaligus menandai runtuhnya Dinasti Umayyah dan lahirnya kekuasaan baru di bawah Dinasti Abbasiyah.

Pada masa-masa awal Abbasiyah, orang-orang Persia banyak bergabung dalam angkatan bersenjata dan struktur pemerintahan bersama orang-orang Arab. Pengaruh budaya Persia tampak jelas, misalnya melalui perayaan Nairuz (Tahun Baru Persia) di lingkungan istana dan penggunaan penutup kepala khas Persia oleh sebagian qadhi dan pejabat.³⁰ Semua ini menunjukkan bahwa di era al-Saffah dan terutama al-Mansur, de-Arabisasi berjalan sebagai sebuah strategi, yaitu kekuasaan politik tetap dipegang Arab, tetapi administrasi, simbol budaya, dan mesin birokrasi banyak diisi dan dibentuk oleh unsur Persia.

Namun, proses de-Arabisasi pada tahap awal tidak sepenuhnya berjalan tanpa resistensi. Al Mansur, sebagai khalifah yang berasal dari etnis Arab, menunjukkan kekhawatiran terhadap semakin besarnya peran Persia dalam birokrasi Abbasiyah. Kekhawatiran ini menguat ketika pengaruh Abu Muslim al-

²⁵ Al-Isy, *Dinasti Abbasiyah*, 14.

²⁶ Al-Khudhari, *Bangkit Dan Runtuhan Daulah Abbasiyah*, 26-27.

²⁷ Al-Isy, *Dinasti Abbasiyah*, 17.

²⁸ Al-Khudhari, *Bangkit Dan Runtuhan Daulah Abbasiyah*, 36.

²⁹ Al-Isy, *Dinasti Abbasiyah*, 18.

³⁰ Muhammad Amin, "PENGARUH PERSIA, TURKI, DAN BYZANTIUM DALAM PERADABAN BANI ABBASIYAH," *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam* 16, no. 1 (June 2016): 61-80.

Khurasani terlihat sangat dominan, yang berpotensi melampaui otoritas khalifah dalam mengendalikan arah pemerintahan.³¹ Dalam situasi seperti itu, al Mansur memandang Abu Muslim sebagai ancaman politik, sehingga muncul keputusan untuk menyingkirkannya hingga pada rencana pembunuhan terhadapnya.³² Peristiwa ini dapat dibaca sebagai upaya elit Arab di puncak kekuasaan untuk menjaga kontrol politik, sekaligus membatasi agar pengaruh Persia tidak berkembang melampaui otoritas khalifah.

Gelombang kedua de-Arabisasi muncul pada akhir periode pertama Abbasiyah dengan menguatnya peran bangsa Turki, terutama sejak masa Khalifah al-Mu'tashim. Ibunya yang berkebangsaan Turki membuatnya secara alamiah membangun hubungan kuat dengan orang-orang Turki.³³ Berbeda dengan Persia yang berperan sebagai birokrat dan administrator, orang-orang Turki ditempatkan langsung dalam struktur militer dan keamanan negara. Pada masa Khalifah al-Watsiq dan setelahnya, dominasi militer Turki semakin kuat dan mulai memengaruhi kebijakan politik serta pengaruh kekhalifahan. Dalam fase ini, hubungan antara etnis Arab dan non-Arab mengalami pergeseran signifikan yaitu khalifah Arab semakin bergantung pada militer Turki untuk mempertahankan kekuasaan, sementara kapasitas khalifah sebagai pengendali politik melemah. Kekuatan mereka bahkan sampai mampu menggeser kekuasaan khalifah, seperti yang terjadi pada peralihan dari al-Watsiq ke al-Mutawakkil.³⁴

Dengan demikian, proses de-Arabisasi dalam Dinasti Abbasiyah periode pertama tidaklah dipenuhi oleh keharmonisan antar etnis karena ia melibatkan ketegangan dan resistensi antara elite Arab dan non-Arab. Di satu sisi, de-Arabisasi membuka ruang bagi orang Persia dan Turki untuk memperluas inklusivitas dan menjadikan pemerintahan bersifat multikultural yang tidak lagi bertumpu pada eksklusivisme Arab seperti pada masa Umayyah. Namun di sisi lain, proses ini juga menimbulkan ketergantungan baru pada kelompok etnis tertentu yang mana awalnya bergantung kepada teknokrat Persia, dan kemudian di akhir periode kekhalifahan bergantung kepada militer Turki yang secara bertahap menggerus kedaulatan politik khalifah. Dengan kata lain, de-Arabisasi berhasil memecah dominasi etnis Arab dan membangun pemerintahan yang lebih inklusif, tetapi sekaligus menyiapkan benih tantangan struktural baru yang akan mewarnai dinamika politik Abbasiyah pada periode-periode berikutnya.

³¹ Al-Isy, *Dinasti Abbasiyah*, 28.

³² Al-Khudhari, *Bangkit Dan Runtuhnya Daulah Abbasiyah*, 84.

³³ Al-Isy, *Dinasti Abbasiyah*, 102.

³⁴ Al-Isy, *Dinasti Abbasiyah*, 106.

Perkembangan Politik Dan Administrasi Pemerintahan

Setelah berhasil menggulingkan Dinasti Umayyah, pemerintahan Abbasiyah di bawah khalifah pertama, Abu al-‘Abbas al-Saffah (750-754 M), mulai merumuskan pola politik baru yang berbeda dari Umayyah. Salah satu ciri utama perubahan ini adalah dibukanya partisipasi politik bagi kelompok non-Arab, terutama kaum mawali Persia, dalam struktur pemerintahan pusat.³⁵ Inovasi kelembagaan paling menonjol pada fase awal ini adalah pembentukan wizarat (jabatan wazir), sebuah lembaga yang tidak dikenal dalam sistem Umayyah dan banyak terinspirasi dari tradisi administrasi Persia.³⁶ Pengangkatan Abu Salamah al-Khallal yang merupakan seorang tokoh Persia sebagai wazir pertama menunjukkan bahwa Abbasiyah secara sadar menempatkan keahlian birokrasi non-Arab sebagai tulang punggung pengelolaan negara. Keberadaan wazir memungkinkan khalifah mendeklegasikan urusan administratif sehari-hari kepada pejabat profesional, sehingga kebijakan negara dapat dijalankan secara lebih sistematis tanpa membebani otoritas personal khalifah. Dengan kata lain, sejak era al-Saffah sudah tampak strategi de-Arabisasi kekuasaan yaitu otoritas tetap berada di tangan khalifah Arab, tetapi mesin birokrasi digerakkan oleh kelompok mawali yang berpengalaman dalam administrasi.

Langkah reformasi politik yang paling strategis berikutnya terjadi pada masa Khalifah al-Mansur (754-775 M) melalui pemindahan ibu kota dari Kufah ke Baghdad. Secara politis, pemindahan ini dimaksudkan untuk menjauh dari basis gejolak politik di Kufah, terutama pasca pemberontakan kelompok Rawandiyyah, dan sekaligus menegaskan identitas baru Abbasiyah yang tidak lagi terikat dengan simbol-simbol Umayyah.³⁷ Dengan demikian, kebijakan al-Mansur bukan sekadar pergantian ibu kota, melainkan puncak dari strategi membangun pusat pemerintahan baru yang mampu berfungsi sekaligus sebagai jantung politik, administrasi, dan ekonomi kekhalifahan.

Pada masa al-Mansur, struktur pemerintahan semakin terdiferensiasi melalui pembentukan jabatan-jabatan seperti al-hajib (protokol istana), al-katib (sekretaris negara), sahib asy-shurtah (kepala keamanan), dan penguatan fungsi al-qadhi (hakim).³⁸ Keberadaan jabatan-jabatan ini memperjelas pembagian kerja dalam pemerintahan seperti pengamanan khalifah yang dapat ditangani secara lebih teratur, urusan surat-menyerat dan administrasi negara menjadi lebih tertib, koordinasi antar wilayah lebih terarah, stabilitas

³⁵ Maulana and Sujatnika, “Islam Dan Peradaban Persia.”

³⁶ Aftab Hussain Gillani and Mohammad Tahir, “The Administration of Abbasids Caliphate: A Fateful Change in the Muslim History,” *Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences* 8, no. 2 (June 2014): 565-71.

³⁷ Hugh Kennedy, *The Early Abbasid Caliphate: A Political History*, Routledge Revivals (New York: Taylor and Francis, 2016), 86.

³⁸ Al-Khudhari, *Bangkit Dan Runtuhnya Daulah Abbasiyah*, 113.

keamanan publik lebih terjaga, dan penyelesaian sengketa masyarakat memperoleh jalur yang lebih pasti. Dengan adanya pembagian fungsi yang jelas, administrasi Abbasiyah menjadi lebih responsif dalam merespons kebutuhan keamanan dan pelayanan publik di berbagai daerah.

Di bidang militer, al-Mansur membentuk dewan militer dengan pola koalisi yang mencerminkan basis politik berdirinya Dinasti Abbasiyah. Ia mempertahankan Tentara Khurasan yang dipimpin oleh Abu Muslim al-Khurasani sebagai kekuatan utama, namun tetap mempertahankan tentara Arab dalam struktur militer.³⁹ Pengaturan dua kekuatan ini merupakan strategi al Mansur untuk menjaga keseimbangan antara pendukung revolusi yang banyak berasal dari kelompok Persia, dengan elit Arab tradisional yang telah lama berpengaruh. Meski efektif untuk konsolidasi awal pemerintahan, pola ini juga berpotensi menimbulkan friksi pada fase pemerintahan berikutnya.

Selanjutnya, pada masa Khalifah al-Mahdi (775-785 M), pola politik menjadi lebih akomodatif. Ia membuka komunikasi dengan berbagai kelompok, termasuk kaum zindiq dan penduduk Hijaz, serta memperkuat hubungan dengan Madinah, Makkah, dan Yaman melalui pembangunan pos-pos perhubungan dan renovasi Masjidil Haram.⁴⁰ Sikap politik yang relatif lunak ini berhasil memperluas basis dukungan sosial pemerintahan dengan berhasilnya mendapatkan dukungan 500 laki-laki dari kaum Anshar untuk menjadi tentara dan pengawalnya.⁴¹ Dalam hal komposisi elit pada pemerintahan, al-Mahdi mencoba menyeimbangkan legitimasi Arab dengan profesionalisme Persia yang mana terlihat dari pengangkatan wazir Arab di satu sisi dan kembalinya teknokrat Persia di sisi lain.

al-Mahdi sempat menunjuk seorang Arab yaitu Abu 'Ubaidillah Mu'awiyah bin Yasar sebagai wazirnya.⁴² Namun menjelang akhir kekuasaannya, jabatan wazir kembali dipegang oleh tokoh Persia yaitu al-Faidh bin Abi Shaleh.⁴³ Pola ini menunjukkan bahwa keahlian administratif Persia tetap dipandang paling efektif, sementara pengangkatan elite Arab berfungsi menjaga legitimasi simbolik dan meredam ketegangan etnis.

Berbeda dengan ayahnya, Khalifah al-Hadi (785-786 M) dikenal memiliki karakter yang keras dan cenderung kaku. Ia menghentikan pendekatan politik terhadap kelompok zindiq dan mengambil kebijakan represif terhadap mereka.⁴⁴ Ia juga tidak melanjutkan upaya memperkuat hubungan dengan

³⁹ Al-Khudhari, *Bangkit Dan Runtuhnya Daulah Abbasiyah*, 114.

⁴⁰ Al-Khudhari, *Bangkit Dan Runtuhnya Daulah Abbasiyah*, 136.

⁴¹ Al-Isy, *Dinasti Abbasiyah*, 45.

⁴² Al-Khudhari, *Bangkit Dan Runtuhnya Daulah Abbasiyah*, 138.

⁴³ Ali Abdurrahman Al-Amru, *Atsar Al-Farsi Fi As-Siyasi Al-Ashri Al-Abbasiy Al-Awwal*, 4th ed. (Riyadh: Obeikan Press, 1992), 193.

⁴⁴ Al-Isy, *Dinasti Abbasiyah*, 49.

keturunan ‘Ali bin Abi Thalib yang sempat dijajaki oleh al-Mahdi. Meskipun demikian, dari sisi struktur kekuasaan, al-Hadi tetap mempertahankan keluarga Barmak, sebuah keluarga Persia yang sangat berpengaruh dalam posisi wazir. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun gaya politiknya berubah menjadi lebih keras, ketergantungan Abbasiyah pada jaringan administrasi Persia tidak berkurang.

Puncak konsolidasi politik dan administrasi periode pertama terjadi pada masa Khalifah Harun al-Rashid (786-809 M). Sejak kecil, Harun sudah terjalin ikatan personal yang kuat dengan keluarga Barmak karena ketika kecil, ia pernah disusui oleh istri Yahya ibn Khalid al-Barmak.⁴⁵ Setelah naik tahta, ar-Rasyid mengangkat Yahya sebagai wazir utama, yang mencerminkan tingkat kepercayaan politik yang sangat tinggi. Pada masa ini pula prestise politik Abbasiyah mencapai puncaknya, tercermin dari hubungan diplomatik dengan kekuatan eksternal seperti Bizantium dan Kerajaan Frank. Pembayaran upeti oleh Ratu Irene dan menjalin hubungan baik dengan Charlemagne menunjukkan pengakuan dan kekuatan geopolitik Abbasiyah di kancah internasional.⁴⁶ Dengan demikian, kejayaan politik Harun ar-Rasyid merupakan puncak dari strategi yang telah dibangun sejak al-Saffah dan al-Mansur, yaitu menggabungkan basis militer yang kuat, birokrasi profesional, dan diplomasi internasional yang aktif.

Pergeseran signifikan mulai terjadi pada masa Khalifah al-Mu’tashim (833-842 M) dan berlanjut pada masa al-Wathiq (842-847 M), ketika dominasi militer Turki semakin menguat. Al-Mu’tashim merekrut tentara Turki dalam jumlah besar dan menjadikan mereka kekuatan militer utama karena ia menyukai tentara Turki yang kuat.⁴⁷ Rekrutmen besar-besaran tentara Turki dan pemindahan ibu kota ke Samarra merupakan respons terhadap ketegangan antara pasukan dan penduduk Baghdad.⁴⁸ Namun, kebijakan ini membawa dampak struktural jangka panjang, karena militer Turki berkembang menjadi aktor politik dominan yang perlahan menggeser peran birokrasi sipil.

Sejak saat itu, pengaruh Turki dalam struktur politik dan militer semakin menguat dan berlanjut hingga masa al-Watsiq. Friksi antara elit Arab, teknokrat Persia, dan komandan Turki mulai melemahkan otoritas khalifah, karena pada masa ini, dominasi pasukan Turki mencapai titik di mana mereka mampu mengendalikan bahkan menggeser posisi al-Watsiq dengan mengangkat al-Mutawakkil sebagai khalifah.⁴⁹ Pergeseran ini menunjukkan bahwa strategi awal Abbasiyah yang pada periode pertama bertumpu pada integrasi Persia dan

⁴⁵ Al-Khudhari, *Bangkit Dan Runtuhnya Daulah Abbasiyah*, 178.

⁴⁶ Al-Isy, *Dinasti Abbasiyah*, 79-81.

⁴⁷ Al-Isy, *Dinasti Abbasiyah*, 103.

⁴⁸ Al-Isy, *Dinasti Abbasiyah*, 103.

⁴⁹ Al-Isy, *Dinasti Abbasiyah*, 106.

koalisi Khurasan bertransformasi menjadi pola baru di mana militer Turki menjadi aktor dominan dalam politik kekhalifahan. Dengan demikian, fenomena ini menunjukkan bahwa de-Arabisasi pada fase akhir periode pertama tidak lagi sekadar strategi inklusi, tetapi telah berkembang menjadi bentuk ketergantungan struktural pada kekuatan militer non-Arab.

Dalam kerangka administrasi, struktur pemerintahan Abbasiyah pada periode pertama berkembang menjadi semakin fungsional dan terspesialisasi. Pada masa al-Mansur, dikenal dua bentuk kementerian utama: Wizarat al-Tanfidz, yang bertindak sebagai tangan kanan khalifah dan menjalankan kebijakan atas namanya dan Wizarat al-Tafwid, yang memiliki kewenangan luas dalam memimpin pemerintahan secara lebih independen, termasuk dalam pengambilan keputusan strategis.⁵⁰ Di samping itu, untuk mendukung tata kelola yang sistematis, dibentuk pula lembaga Diwan al-Kitabah (Sekretariat Negara) yang dipimpin oleh Ra'is al-Kuttab (Kepala Sekretaris).

Di bawahnya Ra'is al-Kuttab, diangkat sejumlah katib (sekretaris) yang bertugas mengoordinasi berbagai departemen. Jabatan-jabatan katib tersebut meliputi: Katib al-Rasa'il (menangani surat-menyurat dan dokumen resmi), Katib al-Kharaj (mengelola urusan pajak), Katib al-Jund (mengurus administrasi militer), Katib al-Shurtah (menangani administrasi kepolisian dan keamanan), serta Katib al-Qadha (mendukung tugas-tugas peradilan).⁵¹ Melalui pembagian tugas yang terspesialisasi ini, pemerintah Abbasiyah berhasil membangun sistem administrasi yang terstruktur dan efisien, sehingga mampu menghadapi kompleksitas pemerintahan yang terus berkembang.

Pada masa Khalifah al-Mahdi, diperkenalkan sejumlah lembaga pengawasan baru untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintahan. Lembaga-lembaga tersebut meliputi: Diwan al-Zimam, yang mengawasi pengelolaan keuangan negara, Diwan al-Tawqi', yang bertugas mengawasi kearsipan dan dokumentasi resmi, dan Diwan al-Nazhar fi al-Mazalim, yang berfungsi sebagai badan pengawas peradilan, setara dengan pengadilan banding.⁵²

Pada masa Khalifah ar-Rasyid, sistem administrasi diperkuat melalui optimalisasi kewenangan lembaga-lembaga yang ada dan pembentukan departemen-departemen baru. Peran Wazir Yahya al-Barmak sangat penting dalam melakukan pembaruan ini. Struktur administrasi pemerintahan pada masa ini semakin terspesialisasi, antara lain melalui pembentukan: Diwan al-Kharaj (mengelola keuangan negara, pemungutan pajak termasuk pajak tanah, dan pembayaran gaji pegawai.), Diwan al-Mustaghallast (mengatur administrasi

⁵⁰ Nabila et al., "Dinamika Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Dinasti Abbasiyah."

⁵¹ Nurfazillah, "PRAKTIK POLITIK DALAM SEJARAH ISLAM ERA DINASTI-DINASTI ISLAM," *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science* 6, no. 1 (October 2020): 43-62, <https://doi.org/10.22373/jai.v6i1.615>.

⁵² Philip Khuri Hitti, *History of the Arabs*, 10th ed. (London: Macmillan Education, 1970), 321.

tanah negara dan aset pemerintah di perkotaan maupun pedesaan yang disewakan.), Diwan al-Musadarah (mengawasi musuh-musuh politik negara), Diwan al-Ahsham (mengawasi pegawai dan aparatur kerajaan), Diwan al-Riqa' (mengumpulkan petisi dan pengaduan masyarakat untuk disampaikan kepada khalifah), Diwan as-Sawad (mengumpulkan seluruh pendapatan negara dan pajak pertanian, menjadi diwan terpenting pada masa ar-Rasyid), Diwan an-Nafaqat (mengelola belanja negara terkait kebutuhan pengadilan, termasuk gaji pejabat peradilan), Diwan Al-Barid (bertanggung jawab atas penyampaian surat-surat dan pesan-pesan ke seluruh negeri).⁵³

Pembentukan lembaga wizarat dan jaringan diwan pada periode pertama Abbasiyah tidak sekadar memperbanyak jabatan administratif, tetapi merupakan solusi struktural atas persoalan pengelolaan wilayah kekhilifahan yang sangat luas dan multietnis. Pada masa Umayyah, pengelolaan negara masih sangat bergantung pada khalifah dan gubernur regional, sehingga koordinasi antarwilayah sering bersifat personal dan tidak terlembagakan.⁵⁴ Abbasiyah mengatasi keterbatasan ini dengan menciptakan birokrasi fungsional yang memisahkan perumusan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Lembaga wizarat berfungsi sebagai pusat koordinasi administratif, memungkinkan khalifah mendeklasikan urusan teknis pemerintahan kepada pejabat profesional tanpa kehilangan otoritas simbolik. Sementara itu, diwan-dewan yang terspesialisasi seperti Diwan al-Kharaj, Diwan al-Jund, dan Diwan al-Barid membuat pengelolaan pajak, militer, dan komunikasi negara berjalan lebih sistematis dan terukur.⁵⁵ Dengan mekanisme ini, negara mampu mengurangi ketimpangan informasi, keterlambatan pengambilan keputusan, dan lemahnya kontrol pusat atas wilayah-wilayah.

Rangkaian pembentukan dan penyempurnaan lembaga-lembaga ini menunjukkan bahwa dalam bidang politik dan administrasi, Dinasti Abbasiyah tidak hanya melanjutkan sistem yang diwarisi dari Umayyah, tetapi mengembangkannya menjadi birokrasi yang lebih terstruktur, terspesialisasi, dan akuntabel.⁵⁶ Dengan demikian, kemajuan politik dan administrasi pada periode pertama Abbasiyah dapat dibaca sebagai puncak dari beberapa strategi utama: integrasi elit non-Arab, sentralisasi kekuasaan di Baghdad, profesionalisasi birokrasi melalui lembaga wazir dan diwan, serta penataan

⁵³ Romdloni Romdloni, "PERKEMBANGAN ADMINISTRASI NEGARA PADA MASA KHALIFAH HARUN AR-RASYID," yfjnp_v1, preprint, OSF Preprints, July 26, 2019, <https://doi.org/10.31219/osf.io/yfjnp>.

⁵⁴ Munawir Haris, "Situasi Politik Pemerintahan Dinasti Umayyah Dan Abbasiyah," *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 10, no. 2 (September 2018): 391-406, <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v10i2.79>.

⁵⁵ Romdloni, "PERKEMBANGAN ADMINISTRASI NEGARA PADA MASA KHALIFAH HARUN AR-RASYID."

⁵⁶ Farah, "PERKEMBANGAN EKONOMI DAN ADMINISTRASI PADA MASA BANI UMAYYAH DAN BANI ABBASIYAH."

ulang basis militer dari koalisi Khurasan-Arab menuju dominasi Turki pada fase akhir periode ini. Semua ini menjadi landasan institusional bagi kelanjutan peradaban Abbasiyah pada fase-fase berikutnya.

Perkembangan Ekonomi

Secara umum, kemajuan ekonomi pada periode pertama Dinasti Abbasiyah tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari rangkaian strategi fiskal, agraria, dan perdagangan yang dirancang secara bertahap oleh para khalifah sejak al-Saffah hingga al-Watsiq. Jika ditelusuri dalam literatur sejarah, masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan al-Ma'mun kerap disebut sebagai puncak kemakmuran karena keduanya mewarisi fondasi ekonomi yang telah dipersiapkan sejak masa al-Saffah, al-Mansur, dan al-Mahdi.⁵⁷ Kemajuan tersebut tidak hanya mencerminkan pertumbuhan ekonomi, melainkan juga menandai perubahan struktur sosial-ekonomi yang melahirkan peluang sekaligus tantangan jangka panjang.

Pada masa al-Mansur, salah satu kebijakan strategis yang berdampak langsung pada perekonomian adalah relokasi ibu kota Abbasiyah ke Baghdad. Kebijakan ini bukan sekadar keputusan administratif, melainkan strategi ekonomi-politik untuk mengendalikan jalur perdagangan utama di sepanjang Sungai Eufrat dan Tigris.⁵⁸ Secara geostrategis, Baghdad ditempatkan dekat bekas pusat kekuasaan Persia (Ctesiphon), sehingga menjadi simpul pertemuan jalur dagang darat dan sungai yang menghubungkan wilayah Syam, Jazirah Arab, Persia, Asia Tengah, hingga India. Posisi ini mendorong tumbuhnya aktivitas perdagangan dan industri perkotaan dalam skala yang belum pernah dicapai sebelumnya pada masa Umayyah.

Kemajuan industri pada masa al-Mansur tercermin dari berkembangnya Baghdad sebagai ibu kota negara yang memiliki beragam jenis industri sebagaimana dikatakan bahwa di kota ini tumbuh industri tekstil, gelas, dan keramik, sementara Basrah dikenal sebagai pusat industri sabun dan gelas.⁵⁹ Bahkan disebutkan bahwa Baghdad pada masa itu memiliki lebih dari 400 kincir air, sekitar 4.000 pabrik gelas, dan 30.000 kilang keramik.⁶⁰ Keberadaan ratusan

⁵⁷ Muh. Mawangir, *SEJARAH PERADABAN DAN PEMIKIRAN ISLAM*, 1st ed. (Palembang: NoerFikri, 2016), 56, <https://repository.radenfatah.ac.id/21435/1/SEJARAH%20PERADABAN%20DAN%20PEMIKIRAN%20ISLAM.pdf>.

⁵⁸ Mumud Salimudin and Siah Khosyi'ah, "Peradaban Ekonomi Islam Masa Keemasan Dinasti Abbasiyah Dan Relevansinya Terhadap Ekonomi Kontemporer," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 11.B (November 2025): 115-32.

⁵⁹ Sulaiman Sulaiman, "Sistem Ekonomi Dinasti Abbasiyah (Tinjauan Historis Pada Masa Pemerintahan Khalifah Al-Mansur 95 H-159 H/714 M- 775 M)," *MUAMALATUNA* 13, no. 1 (June 2021): 84-102, <https://doi.org/10.37035/mua.v13i1.4653>.

⁶⁰ Sulaiman, "Sistem Ekonomi Dinasti Abbasiyah (Tinjauan Historis Pada Masa Pemerintahan Khalifah Al-Mansur 95 H-159 H/714 M- 775 M)."

kincir air menunjukkan pemanfaatan teknologi energi hidrolik untuk produksi dan pengolahan bahan, yang menjadi fondasi penting bagi industrialisasi awal.

Selain itu, pada masa al-Mansur mulai terbangun hubungan maritim antara dunia Arab-Persia dengan India dan Cina. Jejak hubungan dagang ini antara lain terekam dalam laporan perjalanan Sulaiman at Tajir dan para pedagang Muslim lain pada abad ketiga Hijriah.⁶¹ Jalur perdagangan yang dilalui menyusuri Samarkand dan Turkistan Cina yang kemudian dikenal sebagai Jalur Sutra tidak hanya memperluas arus komoditas, tetapi juga memperkuat posisi Abbasiyah dalam jaringan ekonomi. Integrasi perdagangan internasional ini memberi dampak ekonomi dan politik sekaligus.⁶² Dari sisi ekonomi, negara dapat memperluas sumber pendapatan di luar sektor agraria melalui perdagangan, layanan pelabuhan, serta pertumbuhan industri perkotaan seperti tekstil, keramik, dan gelas yang menyerap tenaga kerja. Dari sisi politik, keamanan jalur niaga meningkatkan posisi tawar Abbasiyah dalam diplomasi karena stabilitas rute dagang berkaitan langsung dengan pasokan barang, logam mulia, dan komoditas strategis. Dengan demikian, kemajuan industri dan perdagangan di era al-Mansur merupakan puncak dari strategi menjadikan Baghdad sebagai pusat baru jaringan ekonomi lintas kawasan.

Pada masa al-Mahdi, strategi pembangunan ekonomi dilanjutkan dengan menaruh perhatian besar pada sektor pertanian sebagai basis utama perekonomian negara. Kebijakan keringanan pajak hasil bumi untuk para petani, jaminan perlindungan hak milik dan keselamatan jiwa mereka, serta dorongan perluasan lahan pertanian di berbagai daerah menunjukkan orientasi negara untuk menjaga keseimbangan antara produktivitas ekonomi dan stabilitas sosial. Pembangunan bendungan dan kanal irigasi juga dilakukan untuk meningkatkan efisiensi irigasi dan produktivitas hasil pertanian.⁶³ Melalui kontrol atas air dan tanah, negara mampu mengurangi risiko gagal panen dan menjaga pasokan pangan bagi kota-kota besar seperti Baghdad.

Di sektor pertambangan, al Mahdi mendorong pengelolaan sumber daya alam seperti emas, perak, tembaga, dan besi agar lebih produktif dan terarah.⁶⁴ Aktivitas ini tidak hanya menopang industri dan perdagangan, tetapi juga memperkuat sistem moneter negara. Dengan demikian, kemajuan ekonomi yang tampak pada masa ini baik dari sektor pertanian maupun aktivitas

⁶¹ Hitti, *History of the Arabs*, 343.

⁶² Dieke Husna Kamilla, "Sistem Ekonomi Islam Pada Masa Bani Abbasiyah Dan Potensinya Dalam Ekonomi Masa Kini: The Islamic Economic System in the Abbasid Period and Its Potential in Today's Economy," *Nirwasita: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Ilmu Sosial* 4, no. 2 (September 2023): 117-26, <https://doi.org/10.59672/nirwasita.v4i2.2938>.

⁶³ Kamilla, "Sistem Ekonomi Islam Pada Masa Bani Abbasiyah Dan Potensinya Dalam Ekonomi Masa Kini."

⁶⁴ Muhammad Fathurrohman, *History of Islamic Civilization* (Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca, 2017), 174.

pertambangan merupakan puncak dari strategi memperkokoh ekonomi riil negara melalui kombinasi kebijakan agraria, pengelolaan sumber daya alam, dan stabilitas fiskal. Penguatan ekonomi riil pada masa al Mahdi juga terlihat dari cara negara menata hasil produksi secara lebih sistematis. Air dan irigasi diperlakukan sebagai infrastruktur produksi yang harus dijaga, melalui pembangunan kanal dan bendungan, serta perawatan saluran air agar pertanian tetap stabil dan pengelolaan tambang diarahkan untuk mendukung kebutuhan yang lebih luas, bukan sekadar mengambil bahan mentah.⁶⁵ Pola ini memperkuat basis industri sekaligus memperluas rantai ekonomi yang menopang kekuatan negara.

Kejayaan ekonomi mencapai puncak yang lebih jelas pada masa Harun ar-Rasyid. Kekayaan negara yang melimpah tidak hanya disimpan di Baitul Mal, tetapi dimanfaatkan untuk kepentingan sosial dan fasilitas publik. Pada masanya didirikan rumah sakit, lembaga pendidikan kedokteran dan farmasi, serta berbagai fasilitas publik dan setidaknya terdapat sekitar 800 dokter yang berpraktik, dan di berbagai kota berdiri pemandian umum yang bisa diakses masyarakat menunjukkan bahwa surplus fiskal dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota.⁶⁶ Pada masa ini pula, sistem fiskal Abbasiyah mencapai tingkat kompleksitas tinggi dengan sumber pendapatan yang beragam, antara lain ghanimah, kharaj, jizyah, ‘usyur, dan zakat. .⁶⁷

Kharaj mencakup fungsi tanah yang terkena pajak, upeti atau jizyah penduduk non-Muslim dzimmi, serta pungutan sepersepuluh terhadap para saudagar dzimmi dalam perniagaan yang dikenal dengan istilah ‘usyur.⁶⁸ Adapun zakat dipungut dari hewan ternak, logam mulia yang telah mencapai nisab, komoditas perdagangan, dan hasil-hasil pertanian yang produktif.⁶⁹ Di sisi lain, kebijakan pajak dan tata kelola pertanian tidak selalu menguntungkan masyarakat. Kharaj sebagai pajak tanah memang menjadi instrumen stabilisasi fiskal negara, tetapi bagi petani kecil ia berpotensi menambah tekanan ketika hasil panen turun.

Pada masa ini, pemasukan negara dari sektor pengumpulan pajak saja disebut mencapai 272 juta dirham dan 4,5 juta dinar, yang diperoleh dari wilayah-wilayah seperti Sawad, al-Ahwaz, Kirman, Makran, Isfahan, Sijistan,

⁶⁵ “Sistem Ekonomi Islam Pada Masa Bani Abbasiyah Dan Potensinya Dalam Ekonomi Masa Kini | Nirwasita: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Ilmu Sosial,” accessed December 8, 2025, <https://ojs.mahadewa.ac.id/index.php/nirwasita/article/view/2938>.

⁶⁶ Badri Yatim, *Sejarah peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 52.

⁶⁷ Al-Khudhari, *Bangkit Dan Runtuhnya Daulah Abbasiyah*, 229.

⁶⁸ Al-Khudhari, *Bangkit Dan Runtuhnya Daulah Abbasiyah*, 232.

⁶⁹ Al-Khudhari, *Bangkit Dan Runtuhnya Daulah Abbasiyah*, 258.

Khurasan dan sekitarnya.⁷⁰ Dibandingkan khalifah sebelumnya, angka-angka pendapatan tersebut mencerminkan besarnya kapasitas fiskal negara seperti kemampuan pemerintah menarik surplus dari wilayah-wilayah produktif, mengonsolidasikan administrasi pajak, lalu mengubahnya menjadi belanja negara, pembiayaan birokrasi, militer, dan infrastruktur seperti menggaji para hakim, wali kota, dan pejabat negara, memperbaiki aliran sungai dan irigasi bagi lahan-lahan petani, serta membiayai pengelolaan penjara.

Di sisi lain, dalam riwayat disebutkan bahwa ketika al-Mansur wafat, kas negara berjumlah sekitar 600 juta dirham dan 14 juta dinar, sementara ketika Harun ar-Rasyid meninggal, jumlahnya mencapai lebih dari 900 juta dirham.⁷¹ Angka-angka ini, jika diletakkan dalam konteks kebijakan, menunjukkan bahwa akumulasi kas negara bukan sekadar indikator “kekayaan”, tetapi merupakan puncak dari strategi ekonomi yang konsisten: relokasi ibu kota untuk menguasai jalur dagang, penguatan basis pertanian, perluasan jaringan industri dan perdagangan internasional, serta diversifikasi sumber pendapatan negara. Dengan demikian, perkembangan ekonomi periode pertama Abbasiyah dapat dipetakan dengan jelas: era al-Mansur sebagai fase penataan pusat ekonomi dan jaringan industri-perdagangan, era al-Mahdi sebagai fase penguatan agraria dan sumber daya alam, dan era Harun ar-Rasyid sebagai fase pemanfaatan surplus untuk pembangunan sosial, ilmu pengetahuan, dan infrastruktur peradaban. Pola berlapis inilah yang menjelaskan mengapa era periode pertama ini bisa disebut sebagai puncak kejayaan ekonomi Abbasiyah karena telah melewati rangkaian strategi fiskal, agraria, dan perdagangan yang matang dan berkelanjutan.

Akan tetapi, kemakmuran fiskal Abbasiyah pada periode pertama juga melahirkan konsekuensi jangka panjang. Ketika negara semakin mengandalkan pemasukan kharaj dari kawasan pertanian dan perdagangan, ketahanan ekonomi menjadi sensitif terhadap stabilitas politik di pusat dan kelancaran infrastruktur seperti irigasi kanal, dan keamanan jalur dagang. Pada fase akhir periode pertama, kebutuhan pembiayaan militer yang semakin besar pada masa al-Mu'tashim setelah dikuasai oleh etnis Turki dan kebutuhan membangun ibu kota Samarra merubah prioritas belanja negara.⁷² Dalam jangka panjang, ini membuka ruang bagi kelompok-kelompok elit militer untuk mengubah arah kebijakan fiskal dari pembangunan produktif menuju pembiayaan politik-keamanan.

⁷⁰ Nur Fitri Eka Asbarini and Abdul Chalel Rahman, “Kesejahteraan Dan Keadilan Ekonomi : Studi Tentang Kebijakan Ekonomi Khalifah Harun Ar-Rasyid (786-809 M),” *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi* 1, no. 3 (May 2024): 167-82, <https://doi.org/10.61132/jiesa.v1i3.378>.

⁷¹ Hitti, *History of the Arabs*, 321.

⁷² Al-Isy, *Dinasti Abbasiyah*, 114.

Perkembangan Sistem Hukum

Pada periode pertama Dinasti Abbasiyah, sistem hukum mengalami perkembangan yang signifikan seiring dengan transformasi politik dan administrasi negara. Pemerintahan Abbasiyah menempatkan hukum Islam sebagai dasar normatif dalam penyelenggaraan keadilan, sekaligus membangun kelembagaan peradilan yang lebih terstruktur. Sistem hukum mengalami penataan kelembagaan yang lebih terstruktur, institusi peradilan diperkuat, dan fungsi qadhi diperjelas sebagai pejabat resmi negara, dan lembaga-lembaga pendukung hukum diperluas perannya dalam menjaga stabilitas sosial dan politik.⁷³ Qadhi tidak lagi sekadar figur keagamaan, tetapi menjadi aparat negara yang menjalankan putusan berdasarkan syariah Islam dalam kerangka administrasi kekhalifahan.⁷⁴ Salah satu contoh penting adalah Abu Yusuf, yang berkiprah sebagai qadhi sejak masa Khalifah al-Mahdi dan kemudian diangkat sebagai Qadhi al-Qudhah pada masa Harun al-Rasyid. Pengangkatan ini menandai integrasi pemahaman fikih ke dalam struktur formal negara.

Secara yuridis, pelaksanaan hukum Islam pada masa Abbasiyah mengakomodasi pluralitas mazhab sebagai bagian dari kebijakan hukum. Setiap wilayah memiliki rujukan utama yang berbeda: di Irak, qadhi umumnya merujuk pada mazhab Hanafi yang dikenal fleksibel dalam perkara mu'amalah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat perkotaan, di wilayah Syam dan Maghrib mazhab Maliki lebih dominan, sementara di Mesir mazhab Syafi'i berkembang dan diimplementasikan dalam putusan-putusan peradilan.⁷⁵ Keberagaman ini tidak dilihat sebagai ancaman terhadap kesatuan dan persatuan hukum Islam, melainkan sebagai wujud ijtihad kolektif yang disesuaikan dengan konteks lokal. Dengan demikian, hukum Islam pada masa Abbasiyah bersifat fleksibel secara substantif, tetapi terstandarisasi secara prosedural melalui institusi peradilan negara.

Dari sisi kelembagaan, pembentukan jabatan Qadhi al-Qudhah (Ketua para Hakim) pada masa Harun ar-Rasyid merupakan tonggak penting dalam konsolidasi sistem hukum.⁷⁶ Jabatan ini berfungsi sebagai koordinator para qadhi di berbagai wilayah sekaligus penghubung antara otoritas hukum dan kekuasaan eksekutif. Meskipun diangkat langsung oleh khalifah, Qadhi al-

⁷³ Mathieu Tillier, “Qadis and Their Social Networks: Defining the Judge’s Neutrality in Abbasid Iraq,” *Journal of Abbasid Studies* 4, no. 2 (2017): 123-41, <https://doi.org/10.1163/22142371-12340032>.

⁷⁴ Mathieu Tillier, “Judicial Authority and Qādīs’ Autonomy under the ‘Abbāsids,” *Al-Masāq* 26, no. 2 (May 2014): 119-31, <https://doi.org/10.1080/09503110.2014.915102>.

⁷⁵ Nabila et al., “Dinamika Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Dinasti Abbasiyah.”

⁷⁶ Miftakhus Sifa’ Bahrul Ulumiyah, “Perkembangan Hukum Dan Pengadilan Pada Era Abbasiyah,” *Qurthuba: The Journal of History and Islamic Civilization* 3, no. 2 (March 2020): 210-20, <https://doi.org/10.15642/qurthuba.2020.3.2.210-220>.

Qudhah memiliki tingkat independensi yang tinggi dan sering berperan sebagai penyeimbang kekuasaan eksekutif.

Ulama memiliki peran penting dalam pemerintahan Abbasiyah karena mereka tidak hanya berfungsi sebagai qadhi atau mufti, tetapi juga sebagai otoritas moral dan intelektual yang turut memengaruhi legitimasi hukum negara. Salah satu tokoh yang menonjol adalah Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim, murid utama Abu Hanifah, yang kemudian dikenal sebagai Qadhi al Qudhah pertama. Ia memberi kontribusi besar dalam mempertemukan fikih dengan kebutuhan kebijakan negara melalui karyanya *Kitab al Kharaj*.⁷⁷ Melalui karya tersebut, gagasan tentang keadilan fiskal dan tata kelola perpajakan dalam Islam mulai dirumuskan secara lebih sistematis, sehingga menjadi pijakan awal bagi pembentukan kerangka hukum administrasi negara yang lebih kuat. Selain Abu Yusuf, beberapa ulama terkemuka pada periode awal Abbasiyah antara lain Yahya bin Aksam, yang menjadi qadhi di masa Khalifah al-Ma'mun, dan Ahmad bin Abu Daud, yang menjabat sebagai qadhi pada masa Khalifah al-Mu'tashim.⁷⁸

Bersamaan dengan pembentukan lembaga Qadhi al-Qudhah, diperkuat pula dua lembaga penting lainnya: Pertama, lembaga al-Hisbah, dipimpin oleh Muhtasib, yang bertugas menangani pelanggaran umum yang memerlukan penanganan cepat. Tugasnya mencakup amar makruf nahi munkar, baik dalam urusan hak Allah (seperti larangan minuman keras dan zina) maupun hak manusia (seperti mengganggu ketertiban umum).⁷⁹ Kedua, wilayah al-Mazhalim, yang berperan sebagai pengadilan tinggi yang menangani kasus di luar yurisdiksi qadhi biasa, terutama terkait penyalahgunaan wewenang oleh penguasa, pejabat, atau kerabat istana.⁸⁰ Dalam kaitannya dengan perkembangan ekonomi, sistem hukum ini juga berperan penting dalam mendukung aktivitas industri dan perdagangan.⁸¹ Regulasi muamalah, perlindungan kontrak, pengawasan pasar oleh al-Hisbah, serta kepastian hukum dalam transaksi lintas wilayah membantu menciptakan iklim ekonomi yang baik.

Meskipun kedua lembaga ini telah ada sejak masa Umayyah, pada era Abbasiyah keduanya dikembangkan menjadi lebih terstruktur dan sistematis.⁸² Secara kelembagaan, ketiga institusi ini (Qadhi al-Qudhah, al-Hisbah, dan

⁷⁷ Ian Rakhmawan Suherli, Yadi Janwari, and Dedah Juabaedah, "Transformasi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dalam Peningkatan Pendapatan Negara Yang Berkeadilan Untuk Semua Pihak," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 3 (July 2024), <https://doi.org/10.30651/jms.v9i3.23328>.

⁷⁸ Al-Khudhari, *Bangkit Dan Runtuhan Daulah Abbasiyah*, 388.

⁷⁹ Amelya Izmi Azizah, "Sejarah peradilan Islam pada Masa Dinasti Abasiyyah," *Maliki Interdisciplinary Journal* 2, no. 11 (November 2024): 715-24.

⁸⁰ Ulumiyah, "Perkembangan Hukum Dan Pengadilan Pada Era Abbasiyah."

⁸¹ Nabila et al., "Dinamika Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Dinasti Abbasiyah."

⁸² Muhammad Jumaidi Pamalingan et al., "Penegakan Wilayah Al-Mazalim Pada Era Dinasti Umayyah, Abbasiyah, Dan Turki Ustmani," *Al-Qawāñīn: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, Dan Pengkajian Islam* 2, no. 1 (June 2025): 78-96, <https://doi.org/10.70193/alqawanin.v2i1.04>.

Wilayat al-Mazhalim) bekerja secara sinergis: qadhi menangani sengketa hukum normatif, muhtasib menjaga ketertiban sosial-ekonomi, dan Wilayat al-Mazhalim menjadi kanal keadilan bagi masyarakat yang dirugikan oleh aparat negara. Mereka mencerminkan upaya Dinasti Abbasiyah untuk membangun peradilan yang profesional sekaligus menegakkan keadilan substantif yang melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Dengan demikian, sistem hukum Abbasiyah menampilkan kematangan kelembagaan dan kedewasaan politik hukum Islam, meskipun pada praktik awalnya masih terdapat campur tangan khalifah dalam beberapa keputusan pengadilan.

KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa proses de-Arabisasi pada periode pertama Dinasti Abbasiyah bukan sekadar pergantian etnis penguasa dari Dinasti Umayyah ke Abbasiyah yang bertumpu pada dukungan Persia dan Turki, tetapi merupakan transformasi struktural dalam politik, administrasi, ekonomi, dan sistem hukum. De-Arabisasi dalam konteks ini lebih tepat dipahami sebagai pelemahan dominasi eksklusif etnis Arab dan pembukaan ruang bagi partisipasi bagi kelompok non-Arab, khususnya Persia pada fase awal dan Turki pada fase akhir, dalam pengelolaan negara sekaligus pembentukan pola kekuasaan baru yang bertumpu pada birokrasi profesional dan militer non-Arab. Perubahan ini melahirkan pemerintahan yang lebih multietnis dan birokratis, tetapi memunculkan dinamika sosial baru dalam masyarakat Abbasiyah.

Dari sisi sosial, de-Arabisasi membawa perubahan dalam struktur kelas masyarakat Abbasiyah. Kelompok mawali yang sebelumnya termarginalkan pada masa Umayyah memperoleh akses terhadap jabatan administratif, militer, dan hukum. Namun, pada saat yang sama, perubahan ini juga memunculkan ketegangan antara elit Arab tradisional dan elite non-Arab baru, terutama ketika akses terhadap kekuasaan dan sumber daya negara semakin terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Dengan demikian, de-Arabisasi membawa dampak ganda yaitu inklusivitas sosial di satu sisi, dan potensi friksi sosial di sisi lain.

Dalam bidang politik dan administrasi, integrasi elite Persia memperkuat efektivitas pemerintahan melalui profesionalisasi birokrasi berbasis sistem wizarat dan diwan, serta sentralisasi kekuasaan di Baghdad. Strategi ini berhasil meningkatkan kapasitas negara dalam mengelola wilayah yang luas dan beragam dan juga memperkuat legitimasi Abbasiyah di tingkat internasional. Namun, ketergantungan yang semakin besar pada elite non-Arab terutama militer Turki sejak masa al-Mu'tashim menjadi titik kritis pengelolaan kekuasaan karena ketergantungan ini berdampak buruk yang pada akhirnya

mengurangi otonomi politik khalifah dan melemahkan stabilitas jangka panjang pemerintahan Abbasiyah.

Dari sisi ekonomi, kemakmuran periode pertama Abbasiyah merupakan hasil dari strategi berlapis: penataan fiskal dan basis agraria sejak masa al-Mansur dan al-Mahdi, pengembangan jaringan perdagangan darat dan maritim, serta penguatan industri di pusat kota seperti Baghdad. Puncak kejayaan ekonomi pada masa Harun ar-Rasyid dan al-Ma'mun tercermin bukan hanya dari besarnya kas negara, tetapi juga dari kemampuan negara mengatur surplus fiskal menjadi investasi sosial seperti pembangunan rumah sakit, lembaga pendidikan, dan infrastruktur publik yang menopang lahirnya Zaman Keemasan Abbasiyah. Namun, ketergantungan pada elite non-Arab dalam pengelolaan administrasi dan militer juga berpotensi memengaruhi distribusi kekayaan. Konsentrasi kekuasaan administratif dan militer pada kelompok tertentu berisiko menciptakan ketimpangan ekonomi, terutama jika surplus fiskal lebih banyak dialokasikan untuk militer dibandingkan kesejahteraan kelompok masyarakat bawah dalam jangka panjang.

Dalam bidang hukum, periode pertama Abbasiyah ditandai oleh penguatan kelembagaan peradilan melalui penegasan posisi qadhi sebagai pejabat resmi negara, pembentukan jabatan Qadhi al-Qudhah sebagai koordinasi puncak, serta institusionalisasi lembaga pendukung seperti al-Hisbah dan Wilayat al-Mazhalim. Pluralitas mazhab diakomodasi dengan pengakuan terhadap mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i di wilayah yang berbeda, sehingga hukum Islam tampil fleksibel secara substantif namun tertib secara prosedural. Hal ini menunjukkan kematangan politik hukum Islam yang mampu menggabungkan otoritas normatif syariah dengan kebutuhan tata kelola negara yang kompleks.

Secara keseluruhan, artikel ini menyimpulkan bahwa de-Arabisasi pada periode pertama Abbasiyah merupakan fondasi penting bagi lahirnya pemerintahan Islam yang multietnis dan maju, tetapi juga sebuah proses yang memiliki dua sisi. Di satu sisi berhasil memecah dominasi etnis tunggal dan melahirkan sistem pemerintahan multietnis yang lebih inklusif dan maju; di sisi lain, ia juga membangun ketergantungan baru pada elite Persia dan militer Turki yang perlahan menggerus kedaulatan politik khalifah. Temuan ini membuka ruang lanjutan untuk mengkaji bagaimana dinamika de-Arabisasi pada periode-periode berikutnya berpengaruh terhadap stabilitas politik, keberlanjutan ekonomi, dan konfigurasi otoritas hukum dalam dunia Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Amru, Ali Abdurrahman. *Atsar Al-Farsi Fi As-Siyasi Al-Ashri Al-Abbasiy Al-Awwal*. 4th ed. Riyadh: Obeikan Press, 1992.
Al-Isy, Yusuf. *Dinasti Abbasiyah*. 1st ed. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

- Al-Khudhari, Syaikh Muhammad. *Bangkit Dan Runtuhnya Daulah Abbasiyah*. 1st ed. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016.
- Al-Shbiel, Abeer Obeid. "Arabization and Its Effect on the Arabic Language." *Journal of Language Teaching and Research* 8, no. 3 (2017): 469-75. <https://doi.org/10.17507/jltr.0803.04>.
- Amin, Muhammad. "PENGARUH PERSIA, TURKI, DAN BYZANTIUM DALAM PERADABAN BANI ABBASIYAH." *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam* 16, no. 1 (June 2016): 61-80.
- "Arti Kata De--2 - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Accessed December 6, 2025. <https://kbbi.web.id/de--2>.
- Asbarini, Nur Fitri Eka, and Abdul Chaleh Rahman. "Kesejahteraan Dan Keadilan Ekonomi : Studi Tentang Kebijakan Ekonomi Khalifah Harun Ar-Rasyid (786-809 M)." *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah Dan Akuntansi* 1, no. 3 (May 2024): 167-82. <https://doi.org/10.61132/jiesa.v1i3.378>.
- Azizah, Amelya Izmi. "Sejarah peradilan Islam pada Masa Dinasti Abasiyyah." *Maliki Interdisciplinary Journal* 2, no. 11 (November 2024): 715-24.
- Busthomi, Yazidul, and Rudy Catur Rohman Kusmayadi. "MULTIKULTURALISME PADA MASA UMMAYAH DALAM SEJARAH PERADABAN ISLAM." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (May 2024): 66-79. <https://doi.org/10.58401/takwiluna.v5i1.1334>.
- Fadil SJ. *Pasang Surut Peradaban Islam Dalam Lintasan Sejarah*. Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008.
- Farah, Naila. "PERKEMBANGAN EKONOMI DAN ADMINISTRASI PADA MASA BANI UMAYYAH DAN BANI ABBASIYAH." *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah* 6, no. 2 (February 2016). <https://doi.org/10.24235/amwal.v6i2.227>.
- Fathurrohman, Muhammad. *History of Islamic Civilization*. Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca, 2017.
- Gillani, Aftab Hussain, and Mohammad Tahir. "The Administration of Abbasids Caliphate: A Fateful Change in the Muslim History." *Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences* 8, no. 2 (June 2014): 565-71.
- Haris, Munawir. "Situasi Politik Pemerintahan Dinasti Umayyah Dan Abbasiyah." *Tasamuh: Jurnal Studi Islam* 10, no. 2 (September 2018): 391-406. <https://doi.org/10.47945/tasamuh.v10i2.79>.
- Hasanah, Mahbubah, Ainun Thayyibah, and Muhammad Fadhil Khairi. "HAKIKAT MODERN, MODERNITAS DAN MODERNISASI SERTA SEJARAH MODERNISASI DI DUNIA BARAT." *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, no. 2 (April 2023): 309-18. <https://doi.org/10.55606/religion.v1i2.76>.
- "Hasil Pencarian - KBBI VI Daring." Accessed December 6, 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/de>.
- Herlina, Nina. *Metode Sejarah*. 2nd ed. Bandung: Satya Historika, 2020. https://digilib-pps.insuriponorogo.ac.id/file_buku/b650b4f43aa66c24eb2883d7cae9a8c5.pdf.
- Hidayat, Mohammad Anggi. "PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN, SISTEM PEMERINTAH DAN ILMU TASAWUF PADA DINASTI ABBASIYAH." *Jurnal*

- Keislaman* 5, no. 2 (September 2022): 230-37.
<https://doi.org/10.54298/jk.v5i2.3488>.
- Hitti, Philip Khuri. *History of the Arabs*. 10th ed. London: Macmillan Education, 1970.
- Istighfari, Tiara, and Tenny Sudjatnika. "Gerakan Arabisasi Pada Masa Dinasti Umayyah: Dampak Terhadap Masyarakat Islam Dan Non-Islam." *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 4 (June 2025): 1694-703.
<https://doi.org/10.63822/kkzpx337>.
- Kamilla, Dieke Husna. "Sistem Ekonomi Islam Pada Masa Bani Abbasiyah Dan Potensinya Dalam Ekonomi Masa Kini: The Islamic Economic System in the Abbasid Period and Its Potential in Today's Economy." *Nirwasita: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Ilmu Sosial* 4, no. 2 (September 2023): 117-26. <https://doi.org/10.59672/nirwasita.v4i2.2938>.
- Kennedy, Hugh. *The Early Abbasid Caliphate: A Political History*. Routledge Revivals. New York: Taylor and Francis, 2016.
- Marín-Guzmán, Roberto. "Arab Tribes, the Umayyad Dynasty, and the 'Abbasid Revolution." *American Journal of Islam and Society* 21, no. 4 (October 2004): 57-96. <https://doi.org/10.35632/ajis.v21i4.513>.
- Maulana, Sabda, and Tenny Sudjatnika. "Islam Dan Peradaban Persia: Integrasi Budaya Dan Keilmuan Pada Masa Dinasti Abbasiyah." *Jurnal Teologi Islam* 1, no. 2 (July 2025): 188-97. <https://doi.org/10.63822/shzt2x35>.
- Mawangir, Muh. *SEJARAH PERADABAN DAN PEMIKIRAN ISLAM*. 1st ed. Palembang: NoerFikri, 2016.
<https://repository.radenfatah.ac.id/21435/1/SEJARAH%20PERADABAN%20DAN%20PEMIKIRAN%20ISLAM.pdf>.
- Nabila, Rheny Windi, Nabila Annisa Hasibuan, Sepia Walandari, Dinda Nurul Amalia, and M. Dwi Azwar. "Dinamika Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Dinasti Abbasiyah." *Tabayyun : Journal Of Islamic Studies* 2, no. 01 (June 2024).
<https://journal.tabayyanu.com/index.php/tabyayun/article/view/56>.
- Nurfazillah. "PRAKTIK POLITIK DALAM SEJARAH ISLAM ERA DINASTI-DINASTI ISLAM." *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science* 6, no. 1 (October 2020): 43-62.
<https://doi.org/10.22373/jai.v6i1.615>.
- Pamalingan, Muhammad Jumaidi, Ashar, Abdul Halim Talli, and Asni. "Penegakan Wilayah Al-Mazalim Pada Era Dinasti Umayyah, Abbasiyah, Dan Turki Ustmani." *Al-Qawāñin: Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, Dan Pengkajian Islam* 2, no. 1 (June 2025): 78-96.
<https://doi.org/10.70193/alqawanin.v2i1.04>.
- Putri, Umi Muti'ah, Haidar Putra Daulay, and Solihah Titin Sumanti. "Nilai Pendidikan Interaksi Multikulturalisme Dalam Perwujudan Humanisme Di Era Khalifah Bani Abbasiyah." *Education Achievement: Journal of Science and Research*, January 19, 2025, 263-76.
<https://doi.org/10.51178/jsr.v6i1.2330>.
- Riyadi, Ahmad Syafi'i Mufadzilah, and Muhammad Habib Adi Putra. "Dearabization of Islamic Government during the Abbasid Dynasty."

- Journal of Islamic History and Manuscript* 1, no. 1 (September 2022): 53-68. <https://doi.org/10.24090/jihm.v1i1.6591>.
- Romdloni, Romdloni. "PERKEMBANGAN ADMINISTRASI NEGARA PADA MASA KHALIFAH HARUN AR-RASYID." *Yfjnp_v1*. Preprint, OSF Preprints, July 26, 2019. <https://doi.org/10.31219/osf.io/yfjnp>.
- Salimudin, Mumud, and Siah Khosyi'ah. "Peradaban Ekonomi Islam Masa Keemasan Dinasti Abbasiyah Dan Relevansinya Terhadap Ekonomi Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 11.B (November 2025): 115-32.
- "Sistem Ekonomi Islam Pada Masa Bani Abbasiyah Dan Potensinya Dalam Ekonomi Masa Kini | Nirwasita: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Ilmu Sosial." Accessed December 8, 2025. <https://ojs.mahadewa.ac.id/index.php/nirwasita/article/view/2938>.
- Suherli, Ian Rakhmawan, Yadi Janwari, and Dedah Juabaedah. "Transformasi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dalam Peningkatan Pendapatan Negara Yang Berkeadilan Untuk Semua Pihak." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 3 (July 2024). <https://doi.org/10.30651/jms.v9i3.23328>.
- Sulaiman, Sulaiman. "Sistem Ekonomi Dinasti Abbasiyah (Tinjauan Historis Pada Masa Pemerintahan Khalifah Al-Mansur 95 H-159 H/714 M- 775 M)." *MUAMALATUNA* 13, no. 1 (June 2021): 84-102. <https://doi.org/10.37035/mua.v13i1.4653>.
- Tillier, Mathieu. "Judicial Authority and Qādīs' Autonomy under the 'Abbāsids.'" *Al-Masāq* 26, no. 2 (May 2014): 119-31. <https://doi.org/10.1080/09503110.2014.915102>.
- . "Qadis and Their Social Networks: Defining the Judge's Neutrality in Abbasid Iraq." *Journal of Abbasid Studies* 4, no. 2 (2017): 123-41. <https://doi.org/10.1163/22142371-12340032>.
- Ulumiyah, Miftakhus Sifa' Bahrul. "Perkembangan Hukum Dan Pengadilan Pada Era Abbasiyah." *Qurthuba: The Journal of History and Islamic Civilization* 3, no. 2 (March 2020): 210-20. <https://doi.org/10.15642/qurthuba.2020.3.2.210-220>.
- Wangi, Dewita Sekar, and M. Mujab Mujab. "Masa Keemasan Dinasti Abbasiyah (Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Politik, Ekonomi Dan Sosial Budaya)." *Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan Dan Sejarah Islam* 8, no. 1 (June 2023). <https://doi.org/10.29300/ttjksi.v8i1.4149>.
- Widya, Nabila, and Meyniar Albina. "Multikulturalisme Pada Masa Dinasti Abbasiyah." *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 2 (December 2024): 296-99.
- Yatim, Badri. *Sejarah peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.